



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud perlu disusun Laporan Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

- 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

dan

**WALIKOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2005**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- a. Pendapatan      Rp. 790.214.164.994,-  
    Belanja            Rp. 712.545.911.276,-  
    Surplus                                      Rp. 77.668.253.718,-
- b. Pembiayaan  
    - Penerimaan    Rp. 104.580.219.423,-  
    - Pengeluaran   Rp. 182.248.473.141,-  
    Devisit                                      Rp. (77.668.253.718),-  
    Jumlah                                      Rp. 0,-

**Pasal 2**

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 64.747.507.994,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan      Rp. 725.466.657.000,-
  - b. Realisasi    Rp. 790.214.164.994,-
  - Selisih lebih    Rp. 64.747.507.994,-
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 141.369.656.724,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan              Rp. 853.915.568.000,-
  - b. Realisasi    Rp. 712.545.911.276,-
  - Selisih Kurang    Rp. 141.369.656.724,-
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/devisit sejumlah Rp. 206.117.164.718,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Devisit setelah perubahan              Rp. (128.448.911.000,-)
  - b. Realisasi surplus    Rp. 77.668.253.718,-

Selisih Lebih

Rp. 206.117.164.718,-

(4) Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan	Rp. 171.990.219.000,-
2) Realisasi	Rp. <u>104.580.219.423,-</u>
Selisih Kurang	Rp. 67.409.999.577,-

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan	Rp. 43.541.308.000,-
2) Realisasi	Rp. <u>182.248.473.141,-</u>
Selisih Lebih	Rp. 138.707.165.141,-

**Pasal 3**

(1) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 4.433.417.222.457,00,-
b. Jumlah Utang	Rp. 45.594.667.823,97,-
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 4.387.822.554.633,03,-

(2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 Rp. 141.741.228.941,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. 104.580.219.423,-
b. Jumlah penerimaan kas	Rp. <u>790.214.164.994,-</u>
Jumlah Total Penerimaan Kas	Rp. 894.794.384.417,-
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp. <u>753.053.155.476,-</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 141.741.228.941,-

**Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Realisasi APBD Tahun Anggaran 2005
2. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2005
3. Lampiran III : Aliran Kas Periode 31 Desember 2005
4. Lampiran IV : Surplus/Devisit Periode 31 Desember 2005
5. Lampiran V : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2005

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Agustus 2006

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO

Assisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006    NOMOR 5    SERI A

===== @@@ =====

LAMPIRAN I    PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR     : 9 TAHUN 2006  
TANGGAL   : 29 AGUSTUS 2006

RINGKASAN REALISASI    A P B D    KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN    2005

No	URAIAN	PERUBAHAN ANGGARAN	REALISASI	SELISIH LEBIH (KURANG)	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	173,493,610,000	189,772,077,561	16,278,467,561	9.38%
	a.Pajak Daerah	96,980,000,000	102,853,467,724	5,873,467,724	6.06%
	b.Retribusi Daerah	53,624,230,000	55,445,029,593	1,820,799,593	3.40%
	c.Bagian Laba BUMD	9,004,941,000	8,980,062,615	(24,878,385)	-0.28%
	d.Lain-lain PAD yg sah	13,884,439,000	22,493,517,629	8,609,078,629	62.01%
2	BAG.DANA PERIMBANGAN	515,078,511,000	566,205,445,733	51,126,934,733	9.93%
	a.Bagi Hasil Pajak	182,813,146,000	232,297,539,524	49,484,393,524	27.07%
	b.Bagi Hasil Bukan Pajak	167,365,000	1,809,906,209	1,642,541,209	981.41%
	c.Dana Alokasi Umum	332,098,000,000	332,098,000,000	0	0.00%
	d.Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0.00%
3	BAG.LAIN-LAIN PENDAPATAN	36,894,536,000	34,236,641,700	(2,657,894,300)	-7.20%
	DAERAH YANG SAH				
	a.Pos.Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	36,894,536,000	34,236,641,700	(2,657,894,300)	-7.20%
	JUMLAH PENDAPATAN	725,466,657,000	790,214,164,994	64,747,507,994	8.92%
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				
	1.BELJ. APARATUR DAERAH	223,878,028,000	195,287,944,348	(28,590,083,652)	-12.77%
	A.BELANJA ADM. UMUM	119,404,312,000	109,560,370,955	(9,843,941,045)	-8.24%
	a.Belj. Pegawai	61,150,027,000	57,358,606,101	(3,791,420,899)	-6.20%
	b.Belj. Barang & Jasa	48,187,442,000	43,352,750,090	(4,834,691,910)	-10.03%
	c.Belj. Pemeliharaan	6,529,585,000	5,675,247,139	(854,337,861)	-13.08%
	d.Belj. Perjalanan Dinas	3,537,258,000	3,173,767,625	(363,490,375)	-10.28%
	B.BELJ. OPRAS & PEMEL	23,344,988,000	15,094,725,623	(8,250,262,377)	-35.34%
	C.BELJ. MODAL	17,375,113,000	10,621,871,445	(6,753,241,555)	-38.87%
	D.BELJ. TRANSFER	63,753,615,000	60,010,976,325	(3,742,638,675)	-5.87%
	2.BELJ. PELAYANAN PUBLIK	599,491,047,000	488,854,543,201	(110,636,503,799)	-18.46%
	A.BELANJA ADM. UMUM	357,811,964,075	343,440,784,883	(14,371,179,192)	-4.02%

	a.Belj. Pegawai	341,346,090,875	328,147,174,258	(13,198,916,617)	-3.87%
	b.Belj. Barang & Jasa	12,297,040,800	11,324,984,559	(972,056,241)	-7.90%
	c.Belj. Pemeliharaan	3,514,627,200	3,347,673,066	(166,954,134)	-4.75%
	d.Belj. Perjalanan Dinas	654,205,200	620,953,000	(33,252,200)	-5.08%
	<b>B.BELJ. OPRAS &amp; PEMEL</b>	<b>119,794,372,000</b>	<b>63,520,198,750</b>	(56,274,173,250)	-46.98%
	<b>C.BELJ. MODAL</b>	<b>61,038,039,800</b>	<b>22,356,169,750</b>	(38,681,870,050)	-63.37%
	<b>D.BELJ. TRANSFER</b>	<b>60,846,671,125</b>	<b>59,537,389,818</b>	(1,309,281,307)	-2.15%
<b>C</b>	<b>BELJ. TIDAK TERSANGKA</b>	3,265,414,000	1,122,353,193	(2,143,060,807)	-65.63%
<b>D</b>	<b>BELJ. BUNGA HUTANG</b>	27,281,079,000	27,281,070,534	(8,466)	0.00%
	JUMLAH BELANJA	<b>853,915,568,000</b>	<b>712,545,911,276</b>	<b>(141,369,656,724)</b>	-16.56%
<b>E</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN</b>	(128,448,911,000)	77,668,253,718	206,117,164,718	160.47%
<b>F</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	1.PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<b>171,990,219,000</b>	<b>104,580,219,423</b>	<b>(67,409,999,577)</b>	-39.19%
	a.Sisa Lebih Tahun Lalu	104,580,219,000	104,580,219,423	423	0.00%
	b.Utang pada Pihak ke.3	67,410,000,000	0	(67,410,000,000)	-100.00%
	c.Transfer dari Dana Cadangan	0	0	0	0.00%
	2.PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<b>43,541,308,000</b>	<b>182,248,473,141</b>	<b>138,707,165,141</b>	318.56%
	a.Angsuran Hutang	23,697,952,000	23,697,952,000	0	0.00%
	b.Bantuan Modal/ Investasi	17,006,845,000	16,809,292,200	(197,552,800)	-1.16%
	c.Transfer ke Dana Cadangan	0	0	0	0.00%
	d. Sisa Angg Tahun Berjalan	2,836,511,000	141,741,228,941	138,904,717,941	4897.03%
	<b>DEVISIT PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>(77,668,253,718)</b>	<b>0</b>	
	( F1-F2 )				

WALIKOTA SEMARANG  
ttd  
H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2006  
TANGGAL : 29 agustus 2006

ALIRAN KAS  
PERIODE 31 DESEMBER 2005

1. ALIRAN KAS AKTIVITAS OPERASI

a. Aliran Kas Masuk

1.	PAD	Rp 189,772,077,561	
2.	Dana Alokasi Umum	Rp 332,098,000,000	
3.	Dana Alokasi Khusus	Rp -	
3.	Bagi Hasil Pajak	Rp 232,297,539,524	
4.	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 1,809,906,209	
5.	Lain-lain Pendapatan	Rp 34,236,641,700	+
	Jumlah Arus Kas Masuk		Rp 790,214,164,994

b. Aliran Kas Keluar

	Belanja Administrasi & Umum	Rp 453,001,155,838
1.	Umum	Rp 453,001,155,838
2.	Belanja Operasional & Pemel. (O & M)	Rp 78,580,844,573
3.	Belanja Transfer	Rp 119,582,445,943

4.	Belanja Tidak Tersangka	Rp	1,122,353,193		
5.	Belanja Angsuran Bunga	Rp	27,281,070,534	+	
					Rp 679,567,870,081 -
	<b>SURPLUS ALIRAN KAS BERSIH OPERASI</b>				<b>Rp 110,646,294,913</b>

## 2. ALIRAN KAS AKTIVITAS INVESTASI

### a. Aliran Kas Masuk

Jumlah Aliran Kas Masuk Rp -

### b. Aliran Kas Keluar

Belanja Modal Rp 32,978,041,195

Jumlah Aliran Kas Keluar Rp 32,978,041,195

**DEVISIT ALIRAN KAS AKTIVITAS INVESTASI ( a - b )** Rp (32,978,041,195)

## 3. ALIRAN KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN

### a. Aliran Kas Masuk

Penerimaan Pinjaman	Rp	-	
Transfer dari Dana Cadangan	Rp	-	+
	Rp	-	

### b. Aliran Kas Keluar

Biaya Angsuran Hutang	Rp	23,697,952,000	
Bantuan Modal / Investasi Transfer ke Dana Cadangan	Rp	16,809,292,200	
	Rp	-	+
	Rp	40,507,244,200	

**DEVISIT ALIRAN KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN ( a - b )** Rp (40,507,244,200)

## ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

### a. Aliran Kas Masuk

Penerimaan Hutang PPh Uang di Pemegang Kas Dinas	Rp	31,645,798	
	Rp	349,787,297	+
Jumlah Aliran Kas Masuk	Rp	381,433,095	

### b. Aliran Kas Keluar

Pembayaran Hutang PPh Rp 3,733,731

Jumlah Aliran Kas Keluar Rp 3,733,731

<b>ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	Rp	377,699,364	+
Kenaikan Bersih Kas / (Penurunan Kas)	<b>Rp</b>	<b>37,538,708,882</b>	
Saldo per 1 Januari 2005	Rp	104,583,953,154	+
<b>Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2005</b>	<b>Rp</b>	<b>142,122,662,036</b>	

WALIKOTA SEMARANG  
ttd  
H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2006  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2006

LAPORAN SURPLUS / DEVISIT  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
PERIODE : 31 DESEMBER 2005

I PENDAPATAN

PAD	Rp.	195,639,846,271
DAU	Rp.	332,098,000,000
DAK	Rp.	0
Bagi Hasil Pajak	Rp.	232,680,593,683
Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	1,809,906,209
Pendapatan Lain-lain Yang Syah	Rp.	34,236,641,700

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 796,464,987,863

II PENGELUARAN

Belanja Administrasi dan Umum		451,493,695,594
Belanja Pegawai	Rp.	385,559,516,959
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	53,057,648,805
Belanja Pemeliharaan	Rp.	9,021,969,705
Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	3,854,560,125
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	73,261,006,046
Belanja Transfer	Rp.	117,053,201,988
Belanja Tidak Tersangka	Rp.	1,122,353,193
Subsidi / Bantuan Keuangan	Rp.	5,528,992,955
Belanja Bunga	Rp.	27,281,070,534
Biaya Depresiasi Aktiva Tetap	Rp.	267,168,817,760

JUMLAH PENGELUARAN Rp. 942,909,138,070

SURPLUS / ( DEVISIT) Rp. (146,444,150,207)  
( I - II )

WALIKOTA SEMARANG  
ttd  
H. SUKAWI SUTARIP

===== @@@ =====